



# LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TRIWULAN IV POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2022



DIREKTORAT

politeknik aup

**#AUPWAVE** #DINAMIS #PRODUKTIF #BERTALENTAGLOBAL

[politeknikaup.ac.id](http://politeknikaup.ac.id) [@politeknikaup](https://www.instagram.com/politeknikaup) [@brsdm\\_poltekaup](https://www.facebook.com/brsdm_poltekaup) [@PoliteknikAUP](https://www.facebook.com/PoliteknikAUP) [PoliteknikAUP](https://www.youtube.com/PoliteknikAUP)

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan ramat-Nya, Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan IV Politeknik Ahli Usaha Perikanan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Laporan SPIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Politeknik AUP atas kegiatan SPIP yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya *Good Corporate Government* (GCG) yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi sehingga diperlukan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, oleh karena itu penyusunan SPIP pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu sarana untuk memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan agar menjadi langkah perbaikan yang berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa Laporan SPIP Triwulan IV Politeknik AUP Tahun Anggaran 2022 ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun SPIP Politeknik AUP di waktu yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023

Politeknik Ahli Usaha Perikanan



Dr. Muhammad Hery Riyadi Alauddin, S.Pi., M.Si.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pencapaian target pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari Satuan Kerja (Satker) Unit Eselon II, Eselon I dan tingkat kementerian/Lembaga, dari pimpinan sampai tingkat pelaksana wajib melakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas kegiatan pemerintah di lingkungan ementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Tahun 2022 Triwulan IV, Satker Politeknik AUP telah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan SPIP dari tahun sebelumnya. Politeknik AUP telah melaksanakan SPIP sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan dan sasaran organisasi, output dan outcome, serta target indikator kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat tercapai.

Dalam penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2022, Satker Politeknik AUP telah mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, *output* dan *outcome*, serta target indikator kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi:

- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat;
- Sarana Bidang Pendidikan;
- Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan;
- Layanan Umum;
- Layanan Perkantoran;
- Layanan Manajemen Keuangan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memerlukan suatu strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan suatu sistem pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, khususnya di lingkungan Satuan Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dapat terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pada masing-masing bidang/bagian. Penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien. Untuk mendukung terselenggaranya sistem pengendalian

intern di lingkungan Satuan Kerja Politeknik AUP, secara berkelanjutan maka diperlukan adanya peningkatan penerapan pengendalian intern secara sistematis, masif, dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

## **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup laporan penyelenggaraan SPIP ini meliputi pelaksanaan penyelenggaraan dan penerapan SPIP Satker Politeknik AUP yaitu meliputi gambaran umum penyelenggaraan SPIP, strategi penyelenggaraan SPIP meliputi pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian manajemen risiko dilingkungan Satker Politeknik AUP antara lain:

- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- Sarana Bidang Pendidikan
- Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan
- Layanan Umum
- Layanan Perkantoran
- Layanan Manajemen Keuangan

## **C. Maksud dan Tujuan**

Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2022 Satker Polteknik AUP ini disusun sebagai upaya untuk memberi gambaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan penerapan SPIP Satker Polteknik AUP sesuai dengan karakteristik organisasi instansi serta sesuai dengan PP 60 Tahun 2008. Dengan laporan SPIP ini, diharapkan dapat untuk mengukur progress penyelenggaraan, mengevaluasi keberhasilan pengembangan dan peningkatan penerapan pengendalian intern secara sistematis, masif, dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk mencapai tujuan organisasinya.

## **BAB II**

### **DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP POLITEKNIK AUP**

#### **A. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP**

Dalam tahap Penyelenggaraan terdapat enam parameter yang dipantau yaitu Penyusunan *Grand Design* SPIP, Penguatan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko), Penyelenggaraan Aktivitas Pengendalian, Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi, serta Penyelenggaraan Pemantauan.

##### **1. Pembinaan**

Pelaksanaan pembinaan Satker Politeknik AUP, dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Satgas Sekretariat BRSDM KP dan dilevel Satuan Tugas Politeknik AUP dengan melibatkan Inspektorat Jenderal melalui kegiatan rapat-rapat dan *Focus Group Discussion* (FGD).

##### **2. Focus Group Discussion**

Menyelenggarakan diskusi kelompok atau FGD dengan fasilitator Inspektorat Jenderal, dalam diskusi antara lain:

- memandu diskusi kelompok dalam FGD;
- menyiapkan materi diskusi yang diupayakan ke arah pemahaman atas semua unsur SPIP termasuk subunsur, butir-butir, dan hal-hal yang menjadi perhatian dalam diskusi;
- memandu adanya keseragaman dan kesepakatan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **B. Pelaksanaan SPIP**

Untuk menjamin pencapaian tujuan, dalam menentukan obyek penyelenggaraan SPIP baik di tingkat organisasi dan operasional menjadi prioritas penyelenggaraan SPIP. Penentuan Obyek Prioritas Penyelenggaraan SPIP dilakukan berdasarkan hasil penilaian pemilik risiko di Politeknik AUP dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Etika atau nilai-nilai yang dituntut dalam melaksanakan suatu pekerjaan meliputi hal-hal yang boleh dan tidak boleh serta hal yang dibenarkan atau tidak dibenarkan;
- b. Kompetensi, yaitu kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;

- c. Penataan asset sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan Finansial, yaitu pengaruh kondisi finansial secara umum dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Kompetisi dalam pelaksanaan tugas dikaitkan dengan perbandingannya dengan kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit lainnya;
- e. Mencermati tingkat kompleksitas yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. Mencermati dampak akibat yang ditimbulkan atas suatu kegiatan dikaitkan dengan kinerja instansi pemerintahan secara keseluruhan;
- g. Mencermati sebaran kegiatan secara geografis atas kegiatan yang dilaksanakan;
- h. Mempelajari dan memahami perubahan organisasi yang dialami dalam hubungannya dengan efektivitas pelaksanaan kegiatan;
- i. Mempertimbangan manajemen atau dukungan manajemen pelaksanaan kegiatan termasuk yang dapat menjadi pertimbangan manajemen adalah kegiatan yang bersifat *quick wins* sehingga mendesak untuk ditingkatkan pengendaliannya;
- j. Menindaklanjuti hasil audit yang ditemukan baik oleh auditor eksternal maupun aparat;
- k. Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Satuan Pengawas Internal (SPI) Politeknik AUP;
- l. Proses penilaian yang meliputi identifikasi obyek penyelenggaraan SPIP dan penentuan obyek prioritasnya telah dilakukan dalam pertemuan yang melibatkan para pejabat di lingkungan Politeknik AUP di ruang rapat Politeknik AUP. Berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas, kegiatan yang menjadi Obyek Prioritas pelaksanaan SPIP adalah sebagai berikut:
  - ✓ Pengendalian Rutin (Terlampir)
  - ✓ Pengendalian Berkala (Terlampir)
  - ✓ Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (Terlampir).

## **A. PENGENDALIAN RUTIN**

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian rutin dilaksanakan secara simultan, bertahap dan berjenjang mulai dari staf pelaksana sampai pimpinan. Berikut rangkaian kegiatan pengendalian rutin lingkup Satker Politeknik AUP:

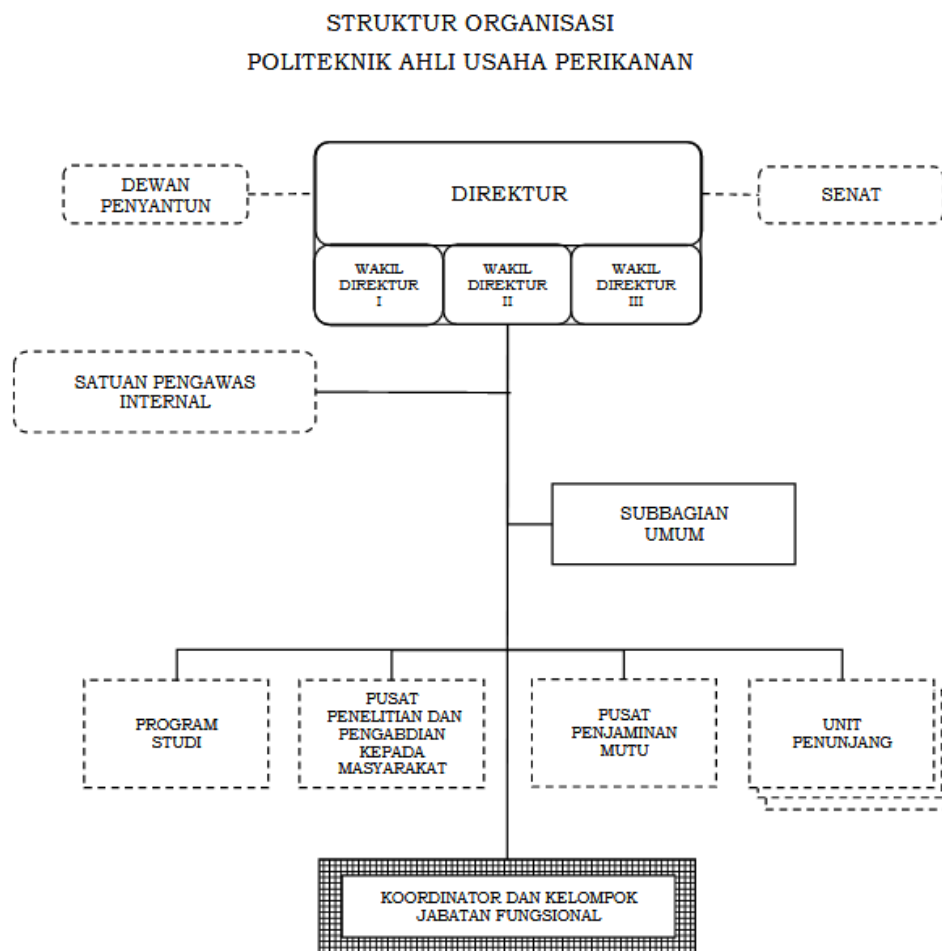
1. Organisasi

Dengan terbitnya Permen KP Nomor: 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan tanggal 28 Desember 2020, bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Politeknik AUP yang baru telah dilakukan sosialisasi kepada pegawai, sehingga pegawai mengetahui dan memahami terhadap:

- tujuan organisasi;
- penerapan SOP;
- tugas dan fungsi pegawai.

Politeknik AUP adalah unit kerja organisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara teknik operasional kepada Kepala Pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan, dan secara administratif kepada Sekretaris Badan yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Politeknik AUP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

Bagan Struktur Organisasi Politeknik AUP sebagai berikut:





## 2. Perencanaan dan Anggaran

Pelaksanaan terhadap perencanaan dan anggaran dilaksanakan oleh Unit Program dan bekerjasama dengan Penanggungjawab kegiatan, baik di unit-unit maupun Program Studi di Politeknik AUP untuk keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan dengan membangun komitmen seluruh jajaran pegawai Politeknik AUP, mulai dari pimpinan sampai staf terbawah serta membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (Inspektorat dan Auditor terkait).

## 3. Akuntansi dan Pelaporan

Melaksanakan pembinaan dan rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi, penyusunan konsolidasi Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan secara rutin dan berkala sesuai dengan pedoman yang berlaku.

## 4. Kinerja dan Kepegawaian

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kemampuan serta untuk memotivasi dalam bekerja, secara rutin Satker Politeknik AUP melakukan penetapan norma pegawai, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas SDM pegawai, pemindahan gaji, tunjangan kinerja, penetapan disiplin pegawai, pemberhentian, hak dan kewajiban lainnya.

## **B. PENGENDALIAN BERKALA**

Hasil pengendalian berkala dari Satker Politeknik Ahli Usaha Perikanan adalah sebagai berikut:

### ➤ SPI Sumber Daya Manusia

Tingkat pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Politeknik AUP dinilai sudah memadai, karena satu orang KPA dan satu orang PPK memiliki tingkat pendidikan pasca sarjana. Tingkat pendidikan untuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) lingkup Satker Politeknik AUP memiliki tingkat pendidikan lulusan Strata 1. Hal ini menunjukkan bahwa PPSPM Satker Politeknik AUP memiliki kualifikasi

pendidikan yang memadai sesuai dengan standar persyaratan. Untuk tingkat pendidikan Bendahara Pengeluaran Satker Politeknik AUP lulusan Strata 1, hal ini menunjukkan bahwa Politeknik AUP memiliki personil dengan kualifikasi pendidikan yang memadai sebagai Bendahara Pengeluaran untuk dapat melaksanakan tugas yang diemban, sehingga diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan.

➤ SPI Anggaran

Kegiatan di masing-masing Unit/Prodi sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS), standar biaya, dan standar biaya keluaran. Sehubungan dengan rencana kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2022, maka anggaran akan mengalami efisiensi. Selanjutnya dalam efisiensi anggaran dan tepat sasaran, telah dilakukan evaluasi dan monitoring kegiatan khususnya kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dan mengakibatkan dampak secara langsung terhadap organisasi.

➤ SPI Barang dan Jasa

Sebagai pelaksanaan Perpres 16 Tahun 2018 *jo* Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan surat undangan dari Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor: B.4124/SJ.6/TU.330/XII/2021 Tentang Perbaikan Rencana Umum (RUP) Pengadaan Tahun 2021, telah ditindaklanjuti yaitu melakukan perbaikan dengan menginput kegiatan pengadaan barang dan jasa Satker Politeknik AUP ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) dengan alamat website: [sirup.lkpp.go.id](http://sirup.lkpp.go.id) oleh Pejabat Pengadaan Satker Politeknik AUP dengan pagu anggaran Rp.78.994.480.000,- (Tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

➤ SPI Barang Milik Negara

Dalam rangka melakukan inventarisasi dan penghapusan BMN Politeknik AUP dari tiga Satker (Jakarta, Bogor dan Serang) digabungkan menjadi

satu Satker (Politeknik AUP) yang tersentralisasi di Jakarta. Perubahan paradigma baru pengelolaan asset negara/barang milik negara telah memunculkan optimisme baru, *best practices* dalam penataan dan pengelolaan asset negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan asset negara yang baik dengan mengedepankan tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stakeholder*.

➤ SPI Kerugian Negara

Pada kegiatan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan-IV tidak ada kerugian negara baik yang ditimbulkan oleh Bendahara, Aparatur Sipil Negara, bukan Bendahara, maupun pejabat lainnya.

➤ SPI Penyerapan Anggaran

Merujuk website <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>, target dan realisasi keuangan dan fisik Satker Politeknik AUP sampai dengan Triwulan-IV Tahun 2022, bahwa presentasi realisasi keuangan Satker Politeknik AUP per 31 Desember 2022 senilai Rp.77.975.241.885,- (*Tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*) atau 98,71% dari pagu anggaran Rp.78.994.480.000,- (*Tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan realisasi fisiknya sebesar 100,00%. Anggaran Satker Politeknik AUP Tahun 2022 bersumber dari dana APBN, sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, masih tersisa anggaran yang tidak terserap sebesar 1,29% atau sebesar Rp.1.019.238.115,- , dengan rincian Belanja Pegawai (Rp.79.477.097,-), Belanja Barang (Rp.939.759.523,-) dan Belanja Modal (Rp.1.495,-) yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- ✓ Beberapa kegiatan tidak jadi dilaksanakan karena ditunda waktu pelaksanaannya seperti pelantikan taruna dan pengukuhan guru besar/professor vokasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan;

- ✓ Pemanfaatan kembali PNBPN yang semula sudah dialokasikan di RKAKL sebesar 74% berubah menjadi 67% di akhir bulan Desember 2022;
- ✓ Mekanisme pencairan anggaran yang membutuhkan waktu yang cukup lama antara Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dan Bendahara Pengeluaran (lokasi Jakarta, Bogor dan Serang);
- ✓ Kekurangan sumber daya manusia di masing-masing Kampus (Jakarta, Bogor dan Serang);
- ✓ Kurang terbangunnya koordinasi yang baik antara penanggungjawab kegiatan dan pengelola anggaran (Program, BPP, Unit Keuangan dan PPK);
- ✓ Perencanaan anggaran untuk pemetaan kegiatan secara proporsional tidak maksimal, sehingga sering terjadinya revisi (POK/DIPA);
- ✓ Penggabungan tiga Satker (Jakarta, Bogor dan Serang) tersentral di Jakarta menjadi satu Satker.

### **C. PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa realisasi keuangan Satker Politeknik AUP pada periode 31 Desember 2022 (Triwulan-IV) senilai Rp.77.975.241.885,- atau 98,71% dari pagu anggaran senilai Rp.78.994.480.000,-. Dengan melihat kondisi permasalahan tersebut maka selanjutnya perlu melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor risiko (*risk factors*) untuk uraian kegiatan yang memiliki risiko. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga dan melindungi organisasi melalui pengelolaan risiko yang mungkin timbul dari berbagai aktifitas serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan. Proses penilaian untuk menentukan masing-masing obyek pendekatan Manajemen Risiko (MR) penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan memberikan skor 1-5 atas 12 kriteria kemudian menjumlahkannya sehingga diperoleh nilai total per masing-masing obyek penyelenggaraan SPIP.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini merupakan tindak lanjut penyelenggaraan implementasi SPIP Satker Politeknik AUP Triwulan-IV Tahun 2022;
2. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPIP ini diperlukan penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern yang dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien (*good government*);
3. Dengan implementasi SPIP pada Satker Politeknik AUP, Triwulan-IV Tahun 2022 telah mencapai realisasi keuangan sebesar 98,71% dan realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%.

Dalam pelaksanaan kegiatan SPIP di Satker Politeknik AUP Triwulan-IV Tahun 2022 telah dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa kendala, hal ini disebabkan oleh:

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum dijalankan secara optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
- Perencanaan anggaran untuk pemetaan kegiatan secara proporsional belum maksimal dan belum dilengkapi dengan penilaian risiko;
- Penggabungan tiga Satker (Jakarta, Bogor dan Serang) tersentral di Jakarta menjadi satu Satker;
- Pemahaman tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal;
- Dukungan SDM kompeten belum terpenuhi.

#### **B. SARAN**

Mengingat masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Satker Politeknik AUP Triwulan-IV tahun 2022, maka yang perlu ditindaklanjuti segera adalah pemahaman

bersama tentang pentingnya SPIP sebagai pengendali dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga tujuan dan realisasi berdasarkan output kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

# LAMPIRAN

## FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. **Satuan Kerja** : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
2. **Kegiatan** : Pengadaan Makan (Catering) Taruna Periode Mei s/d Desember 2022
3. **Pagu Anggaran** : Rp.7.824.642.000,- (Tujuh milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)
4. **Tahun Anggaran** : 2022

No	Kebijakan/Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko						Rata-Rata		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Pengendalian					Risiko Residual																	
									Yusrizal		Ade		Supomo		K	D			K	D	K	D	Uraian	Jadwal (triwulan)				K	D												
									K	D	K	D	K	D										K	D	I	II			III	IV										
									10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20				21	22															
1.	Pengadaan Makan (Catering) Taruna TA. 2022																																								
a.	Proses Pengadaan	- Melakukan perencanaan, dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemakletan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa dan penyusunan biaya pendukung	RAB dan HPS belum disusun	Penanggungjawab kegiatan belum mengetahui rencana peserta didik masuk Asrama	Pelaksanaan pekerjaan belum dapat diketahui	C	PPK/POKJA PBJ/PPA/Pj. Kegiatan	Kontigensi (Koordinasi)	4	3	5	3	4	4	4.3	3.3	14.4		Koordinasi KPA /PPK/ Pj. Kegiatan	√	√	√	√	2	2																
b.	Pelaksanaan	- Penetapan pemenang tender/seleksi dan penandatanganan kontrak	Volume tidak sesuai	Penyedia dan pengawas Tidak menghitung hasil pekerjaan dengan benar	Makanan yang disajikan menjadi kurang	C	PPK/PJ. Kegiatan/ Pembina	Kontigensi (Koordinasi)	4	4	3	2	2	3	3.0	3.0	9.0		Koordinasi KPA /PPK/ Pokja PBJ	√	√	√	√	1	1																
			Spesifikasi tidak sesuai	Penyedia dan pengawas pekerjaan tidak meneliti spesifikasi bahan yang digunakan	Menu makanan sering berubah-ubah	C	PPK/PJ. Kegiatan/ Pembina	Kontigensi (Koordinasi)	3	4	4	3	3	4	3.3	3.7	12.2		Koordinasi KPA /PPK/ Pokja PBJ	√	√	√	√	1	1																
			Keterlambatan pekerjaan	Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai schedule	Kegiatan akademik taruna terlantar	C	PPK/PJ. Kegiatan/ Pembina	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	4	3	3	3.0	3.3	10.0		Koordinasi KPA /PPK/ Pokja PBJ	√	√	√	√	1	1																
c.	PHO/Serah Terima	- PHO Sesuai dengan Spesifikasi volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan	Keterbatasan waktu pemeriksa	Keterbatasan SDM yang diambil dari Tusi pekerjaan yang lain	BAST tidak sesuai hasil pekerjaan	C	PPK/POKJA PBJ/PPA/Pj. Kegiatan	Kontigensi (Koordinasi)	4	3	4	3	4	3	4.0	3.0	12.0		Koordinasi PPK/PPHP	√	√	√	√	2	1																
		- Pembayaran sesuai hasil pekerjaan	Pembayaran pekerjaan melebihi prestasi pekerjaan	Tidak dilakukan pengecekan fisik dan administrasi	Terjadi kerugian negara	C	PPK/POKJA PBJ/PPA/Pj. Kegiatan	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	2	4	4	4	3.0	3.7	11.0		Koordinasi PPK/PPHP	√	√	√	√	1	1																
d.	Pemanfaatan	- Terpenuhinya kebutuhan makan bagi taruna/i	Spesifikasi dan kuantitas makanan/ catering yang disajikan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak	Penerima barang (internal) kurang aktif melakukan kontrol	Para Taruna kurang mendapatkan gizi yang ideal	UC	PPK/POKJA PBJ/PPA/Pj. Kegiatan	Koordinasi dan pengawasan secara efektif	5	4	5	3	5	4	5.0	3.7	18.3		Koordinasi PPK/ SPI/ Pj. Kegiatan	√	√	√	√	3	2																

Penanggung Jawab:  
Pejabat Pembuat Komitmen,

  
Jaulim Sirait





### FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
2. Kegiatan : Docking KM.Madidihang-03
3. Pagu Anggaran : Rp 908.871.000,- (Sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
4. Tahun Anggaran : 2022

No	Kebijakan/Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko								Rata-Rata	Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Pengendalian				Risiko Residual		
									Supomo		Handri		Ade		Choer					Uraian	Jadwal (triwulan)					
									K	D	K	D	K	D	K	D					K	D	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				21	22
<b>I. BELANJA BARANG</b>																										
1. Pengadaan Docking Kapal Madidihang-03 TA.2022																										
a.	Perencanaan	- Dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemaketan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa dan penyusunan biaya pendukung	RAB tidak sesuai dengan pekerjaan	Penyusunan RAB yang berdasarkan perkiraan dan kurang mendalam	Terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB	C	PA/KPA/ PPK/ UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	2	3	2	3	2	3	2	3	2.0	3.0	6.0	Koordinasi KPA /PPK/ Pj.Kegiatan	√	√	√	√	1	2
b.	Persiapan	- Untuk menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan atau;	HPS tidak valid	Kurang jelasnya dalam melakukan survey harga pasar	Dokumen kontrak pengadaan terlambat dibuatkan	C	PA/KPA/ PPK	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	3	2	3	2	3	2.5	3.0	7.5	Koordinasi PPK/ Pokja PBJ/ Pj.Kegiatan	√	√	√	√	1	2
		- Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga	Surat jaminan tidak jelas dan atau/ditolak	Menggunakan surat jaminan dari Asuransi bukan Bank				Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	2	3	4	2	3	2.8	3.0	8.3		√	√	√	√	3	2
c.	Pelaksanaan	- Penetapan pemenang tender/seleksi sampai dengan serah terima hasil pekerjaan berjalan lancar	Terlambatnya pelaksanaan pekerjaan kegiatan docking	Sk Pokja PBJ terlambat disampaikan oleh Pejabat KKP Pusat yang berwenang	Taruna tidak bisa praktik layar sesuai kalender akademik yang sudah ditentukan	UC	PPA/Pokja PBJ/PPK/Pj. Kegiatan	Koordinasi dan pengawasan secara efektif	5	4	5	4	5	4	4	4	4.8	4.0	19.0	Koordinasi PPK/ Pokja PBJ/ Pj.Kegiatan	√	√	√	√	3	2
d.	Pemanfaatan	- Terlaksananya praktik layar bagi taruna/i	Praktik layar taruna tidak bisa dialihkan ke waktu lainnya	Adanya penambahan item pekerjaan docking	Jumlah hari layar bagi Taruna tidak tercapai, sehingga harus menunggu jadwal berikutnya	C	PPK/PBJ/ Prodi TPI	Kontigensi (Koordinasi)	4	4	3	4	4	3	4	3	3.8	3.5	13.1	Koordinasi PPK/ SPI/ Pj.Kegiatan	√	√	√	√	1	1

Penanggung Jawab:  
Pejabat Pembuat Komitmen,

  
Jaulim Sirait





## FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan  
 2. Kegiatan : Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama (55% dari Penerimaan)  
 3. Pagu Anggaran : Rp.1.020.000.000,- (Satu miliar dua puluh juta rupiah)  
 4. Tahun Anggaran : 2022

No	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko								Rata-Rata		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Pengendalian								Risiko Residual	
									Sirait		Yusrizal		Dewi		Supomo		K	D			Uraian				Jadwal (triwulan)				K	D
									K	D	K	D	K	D	K	D					K	D	I	II	III	IV	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								21	22		
1.	Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama (55% dari Penerimaan) 2021:																													
a.	Proses Pengadaan	- Melakukan perencanaan, dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAJ, perkiraan biaya/RAB, pemaketan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa dan penyusunan biaya pendukung	Keterlambatan dalam penyusunan RAB	Perubahan spesifikasi dan item barang yang akan diadakan	Keterlambatan dalam pelaksanaan	C	PA/KPA/ PPK/ UKPBJ/SPI/ Prodi	Kontigensi (Koordinasi)	2	3	2	3	2	3	2	3	2.0	3.0	6.0		Koordinasi KPA /PPK/ Pj.Kegiatan	√	√	√	√	1	2			
			Melakukan tahap persiapan, untuk menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis/KAJ dan atau;	HPS tidak valid	Kondisi saat ini yang kurang baik sehingga harga dan ketersediaan barang tidak stabil	Dokumen kontrak pengadaan terlambat dibuatkan	C	PA/KPA/ PPK	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	2	3	3	3	2	3	2.5	3.0	7.5		Koordinasi PPK/ Pokja PBJ/Pj.Kegiatan	√	√	√	√	1	2		
b.	Pelaksanaan	- Penetapan pemenang tender/seleksi dan penandatanganan kontrak	Volume dan spesifikasi tidak sesuai	Ketersediaan dan harga barang di pasaran dapat berubah/tidak stabil	Addendum kontrak yaitu pekerjaan tambah kurang item	C	PA/KPA/ PPK/ UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	3	4	5	3	5	3	5	3	4.5	3.3	14.6		Koordinasi PPK/ Pokja PBJ/Pj.Kegiatan	√	√	√	√	2	1			
			Barang yang dikirim oleh Penyedia tidak sesuai jadwal	Pekerjaan dilakukan secara bertahap	Taruna tidak bisa menggunakan barang secara bersama-sama (seragam)	UC	PPK/ Pj.Kegiatan/UK PBJ	Koordinasi/ pengawasan secara efektif	5	4	5	3	5	4	5	4	5.0	3.8	18.8	UC	Koordinasi PPK/ Pokja PBJ/ Pj.Kegiatan	√	√	√	√	3	2			
c.	PHO/Serah Terima	- PHO sesuai dengan Spesifikasi volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan  - Pembayaran sesuai hasil pekerjaan	Keterbatasan waktu pemaksa	Adanya jadwal waktu kerja karena pembatasan dalam kehadiran di kantor	BAST tidak sesuai jadwal pekerjaan	C	PA/KPA/ PPK/ UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	4	3	4	3	4	3	4	3	4.0	3.0	12.0		Koordinasi PPK/PPHP/ Pj.Kegiatan	√	√	√	√	2	1			
			Pembayaran pekerjaan melebihi jadwal pembayaran pekerjaan		Pembayaran pekerjaan melebihi jadwal pembayaran pekerjaan	Keterlambatan pembayaran dan realisasi pekerjaan	C	PA/KPA/ PPK/ UKPBJ/SPI	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	2	3	3	3	4	4	3.0	3.3	9.8		Koordinasi PPK/PPHP/ Pj.Kegiatan	√	√	√	√	1	1		
d.	Pemanfaatan	- Terlaksananya kegiatan pembelajaran yang baik	Barang/alat yang diadakan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik	Pengukuran kepada taruna secara On Line	Barang yang dibelanjakan tidak dapat digunakan oleh taruna tepat waktu	C	PA/PPK/ PBJ/ Prodi/ Pj.Kegiatan	Kontigensi (Koordinasi)	3	4	4	3	3	4	4	3	3.5	3.5	12.3		Koordinasi PPK/ SPI/ Pj.Kegiatan	√	√	√	√	1	1			

Penanggung Jawab:  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
  
 Jaulim Sirait



PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

FORMULIR : SPI-SDM

1. Nama Unit Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta  
 2. Nama Eselon I : Badan Riset dan SDM-KP  
 3. Semester/Triwulan/Tahun : II/IV/2022

No.	Uraian	KPA	PPK	Pejabat Penanda Tangan SPM/Penguji Tagihan	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan
1.	Nama Lengkap	Dr. M. Hery Riyadi Alauddin, S.Pi, M.Si	Drs. Jaulim Sirait, M.Si	Neneng Marhani, S.Sos	Rindu Linanda, SE, BNT	Iman Sulaeman, BNT
2.	Nomor SK dan Tanggal SK	KEP.100/MEN/KU.611/2021 29 Desember 2021	KEP.1/POLTEK-AUP/KU.611/I/2022 3 Januari 2022	KEP.1/POLTEK-AUP/KU.611/I/2022 3 Januari 2022	Kep.339/STP/KU.110/IX/2020 01 September 2020	Kep.339/STP/KU.110/IX/2020 01 September 2020
3.	Nomor HP	08158081821	0811106625	089628741213	085286248094	085718075666
4.	Alamat Email	heryal72@gmail.com	ustadsirad@yahoo.com	nenengmarhani@yahoo.co.id	rindulinanda@gmail.com	imansulaeman82@gmail.com
5.	Pendidikan Terakhir	S3	S2	S1	S1	SLTA
6.	Sertifikasi :					
	a. Pengadaan Barang/Jasa		√	√		
	b. Bendahara			√	√	√
	c. Perbendaharaan					
	d. Standar Akuntansi Pemerintah					
	e. Lainnya (sebutkan)					
7.	Usulan /Rencana Pengembangan SDM**) )					

Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada unit kerja lebih dari satu orang

\*) : Diisi dengan tanda (v) pada kolom yg sesuai dengan sertifikasi yang diikuti oleh masing-masing pengelola anggaran

\*\*) : Diisi Usulan/rencana Untuk Pengembangan kapasitas SDM



**PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN**

1. Nama Unit Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta  
 2. Nama Eselon I : Badan Riset dan SDMKP  
 3. Tahun Anggaran : 2022

No.	Nama Program/Kegiatan/Output/ Komponen *)	Kesesuain Dengan	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN ESELON-I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	FASILITASI dan PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
2.	SARANA BIDANG PENDIDIKAN	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
3.	SARANA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
4.	PENDIDIKAN VOKASI BIDANG PERTANIAN dan PERIKANAN	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
5.	PENELITIAN dan PENGEMBANGAN PRODUK	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
6.	LAYANAN UMUM	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
7.	LAYANAN PERKANTORAN	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
8.	LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	

Keterangan : Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

\*) Kolom (2) : Untuk eselon-I diisi program, untuk eselon-II, Dekonsentrasi dan TP diisi kegiatan, eselon-III diisi output, dan eselon IV diisi komponen

\*\*) Standar biaya lainnya yang disahkan oleh Kementerian Keuangan diluar standar biaya masukan

Direktur,  
  
 Muhammad Hery Riyadi Alauddin





**PENGENDALIAN TERHADAP PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)**

NAMA UNIT KERJA : POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN JAKARTA  
 NAMA ESELON I : BADAN RISET DAN SDM KP  
 SEMESTER/TAHUN : II/2022

NO	JENIS BMN	NILAI BMN (Rp *)	PENGELOLA BMN			PERMASALAHAN BMN					RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			SATKER	PIHAK III	KSO	SENGKETA	KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>B.</b>	<b>TIDAK BERGERAK</b>											
	<b>BANGUNAN</b>											
1	KANTOR UTAMA	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
2	BG. Lab.KIMIA	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
3	BG. Lab.MESIN	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
4	BG.Lab.BASAH	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
5	BG.Lab.TEMPA	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
6	BG.Lab.BIOLOGI	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
7	BG.Lab.MIKRO	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
8	BG.Lab.TPH	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
9	BG. BST / KAPAL BATU	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
10	LAB.SIMULATOR BARU/ALBACORE	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
11	LAB SIMULATOR LAMA/NAVIGASI	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
12	LAB. NAVIGASI/FISHING GEAR	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
13	BG. RUANG MEKANIK	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
14	BG. TEMPAT IBADAH (MASJID)	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
15	BG. TEMPAT WUDHU	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
16	G. PERTEMUAN /VIP	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
17	BG. R.SIMULATOR LAMA	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
18	BG. Pendidikan KLAS A	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
19	BG. Pendidikan KLAS B	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
20	Gd. AUDITORIUM / AULA	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
21	BG. Pendidikan KLAS C	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
22	BG. Pendidikan KLAS D	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
23	POS JAGA SATPAM	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
24	Gd. PERPUSTAKAAN	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
25	B. PENAMPUNGAN	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
26	ASRAMA JALADRI	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
27	LOLIGO/ R. MAKAN	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
28	ASRAMA EPHIRA	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
29	ASRAMA OCTOPUS	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
30	ASRAMA THUNUS	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
31	ASRAMA SEPHIA	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
32	BG. MESS NAUTILUS	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
33	ASRAMA ASTEROIDA	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
34	R. DINAS / GUESTHOUSE	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-

PENGENDALIAN TERHADAP PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NAMA UNIT KERJA : POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN JAKARTA  
 NAMA ESELON I : BADAN RISET DAN SDM KP  
 SEMESTER/TAHUN : II/2022

NO	JENIS BMN	NILAI BMN (Rp) *)	PENGELOLA BMN			PERMASALAHAN BMN					RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			SATKER	PIHAK III	KSO	SENGKETA	KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	R. DINAS JURU MASAK	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
36	R. DINAS / FLAT A	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
37	R. DINAS KETUA STP	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
38	POLIKLINIK	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
39	KOLAM RENANG	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
40	TEMPAT GANTI KOLAM RENANG	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
41	B. KANTIN	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
42	BG. GUDANG/BEDENG	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
43	R. DINAS SAMPING KIRI MASJID	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
44	BG. RUANG MEKANIK	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
45	GARASI KENDARAAN DINAS	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
46	SARANA OLAH RAGA	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
47	LAB. PEMBENIHAN	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
	<b>JALAN</b>											
1	ASPAL JALAN MASUK	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
	<b>IRIGASI</b>											
1	SALURAN DRAINASE	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
	<b>JARINGAN</b>											
	<b>TANAH</b>											
	KAMPUS STP JAKARTA	-	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
	<b>Sub. Total .....</b>	-		-	-	-		-	-	-	-	-
	<b>TOTAL:</b>		POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-

Keterangan : pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

\*) Diisi untuk BMN yang bermasalah

\*\*\*) Diisi dengan Pilihan Satuan Kerja/Pihak III/kerja sama Operasi (KSO), diuraikan secara jelas pihak Pengelola (pihak III) dan Pelaksana (KSO)


  
 Jakarta, 5 Januari 2023  
 Direktur  
 Muhammad Heny Riyadi Alauddin



## PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta  
 2. Unit Eselon I : Badan Riset dan SDM KP  
 3. Tahun Anggaran : 2022

## A. Rekapitulasi

No	Pelaksanaan Kegiatan	Target 100 %	B12 (2021)	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1	Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama (55% dari Penerimaan) 2021														
	- Proses Pengadaan			√	√										
	- Tanda tangan Kontrak					√									
	- Pelaksanaan					√	√	√	√	√					
	- PHO/serah Terima					√	√	√							
2	Docking KM.Madidihang-03														
	- Proses Pengadaan							√	√						
	- Tanda tangan Kontrak									√					
	- Pelaksanaan									√	√	√			
	- PHO/serah Terima												√		
3	Budidaya Udang Vaname Siklus-1														
	- Proses Pengadaan			√											
	- Tanda tangan Kontrak				√										
	- Pelaksanaan				√	√	√								
	- PHO/serah Terima				√										
4	Budidaya Udang Vaname Siklus-2														
	- Proses Pengadaan							√							
	- Tanda tangan Kontrak								√						
	- Pelaksanaan								√	√	√				
	- PHO/serah Terima								√	√					
5	Budidaya Udang Vaname Siklus-4														
	- Proses Pengadaan										√				
	- Tanda tangan Kontrak											√			
	- Pelaksanaan												√	√	√
	- PHO/serah Terima												√		

B. Pelaksanaan Per Paket

No.	Nama Paket Pengadaan	JENIS BARANG DAN PAGU			Metode Yang Direncanakan	Jadwal Tahapan Sesuai Methode		Permasalahan	Rencana Aksi	Realisasi
		Barang	Modal	Sosial		Rencana	Realisasi			
<b>Rp. 200 jt s/d Rp. 5 Milyard</b>										
1.	Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama (55% dari Penerimaan) 2021	1,020,000,000	-	-	Tender	Bulan Januari s/d April 2022	Bulan Februari s/d Juli 2022	Addendum Kontrak	1,020,000,000	1,019,912,733
2.	Docking KM.Madidihang-03	894,564,000	-	-	Tender	Bulan Maret s/d April 2022	Bulan Mei s/d Oktober 2022	Addendum Kontrak Pelaksanaan Docking	894,564,000	894,554,550
3.	Budidaya Udang Vaname Siklus-1	199,758,000	-	-	PL/Non Tender	Bulan Januari s/d Februari 2022	Bulan Februari s/d Maret 2022	Banjir Rob (tidak panen)	199,758,000	199,757,325
4.	Budidaya Udang Vaname Siklus-2	198,387,000	-	-	PL/Non Tender	Bulan Februari s/d Juni 2022	Bulan Mei s/d Juni 2022	NIHIL	198,387,000	198,386,089
5.	Budidaya Udang Vaname Siklus-4	199,435,000	-	-	PL/Non Tender	Bulan Juni s/d Nopember 2022	Bulan September s/d Desember 2022	NIHIL	199,435,000	199,434,260
6.	Pengadaan Bahan Makan Taruna, periode Januari s/d April 2022	2,047,500,000	-	-	Tender	Bulan Januari s/d April 2022	Bulan Januari s/d April 2022	Dialihkan ke sistem catering	2,047,500,000	1,583,956,639
7.	Pengadaan Makan Taruna (Catering), periode Mei s/d Desember 2022	8,064,034,000	-	-	Tender	Bulan Mei s/d Desember 2022	Bulan Mei s/d September 2022	Revisi DIPA-8	8,064,034,000	8,048,744,550
8.	Kebutuhan Barang Penanganan Covid-19	200,000,000	-	-	PL/Non Tender	Bulan Februari s/d Maret 2022	Bulan Maret s/d Mei 2022	NIHIL	200,000,000	198,441,360
<b>TOTAL .....</b>		<b>12,823,678,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>12,823,678,000</b>	<b>12,343,187,506</b>


  
 Direktur
   
 Muhammad Hety Riyadi Alaudin

## PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)

1. Nama Unit Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta  
 2. Nama Eselon I : Badan Riset dan SDM KP  
 3. Semester/Tahun : II/2022

No.	Klarifikasi dan Uraian KN	Nilai Indikasi KN *)	Status Kerugian Negara			Permasalahan	Rencana Pemecahan Masalah	Realisasi Pemecahan Masalah
			Belum ada Penetapan **)	Sudah Ada Penetapan				
				Tidak Ada Ganti Rugi	Pengenaan Ganti Rugi			
A.	BENDAHARA	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil			
B.	PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil			
C.	PEJABAT LAIN	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil			

Keterangan : Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

\*) Diisi dengan nilai perolehan BMN

\*\*) Jelaskan posisi proses penyelesaian

\*\*\* Diisi dengan nilai kerugian negara hasil penetapan



**PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN**

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta
- 2. Unit Eselon I : Badan Riset dan SDM KP
- 3. Tahun Anggaran : 2022

**A. Progres Keuangan**

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
TARGET	1,316,341,396	3,443,467,457	8,005,857,827	9,318,249,962	5,324,232,551	6,029,959,010	8,173,848,631	6,172,135,169	6,348,388,051	6,531,547,023	6,550,468,443	10,760,746,365
REALISASI	1,316,341,396	3,443,467,457	8,005,857,827	9,318,249,962	5,324,232,551	6,029,959,010	8,173,848,631	6,172,135,169	6,348,388,051	6,531,547,023	6,550,468,443	10,760,746,365
TOTAL:	1,316,341,396	4,759,808,853	12,765,666,680	22,083,916,642	27,408,149,193	33,438,108,203	41,611,956,834	47,784,092,003	54,132,480,054	60,664,027,077	67,214,495,520	77,975,241,885
Realisasi:	1.67%	4.36%	10.13%	11.80%	6.74%	7.63%	10.35%	7.81%	8.04%	8.27%	8.29%	13.62%
Total :	1.67%	6.03%	16.16%	27.96%	34.70%	42.33%	52.68%	60.49%	68.53%	76.80%	85.09%	98.71%

**B. Progres Fisik**

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
TARGET	26%	5%	5%	7%	8%	6%	7%	8%	7%	6%	8%	7%
REALISASI	26%	5%	5%	7%	8%	6%	7%	8%	7%	6%	8%	7%
Total :	26%	31%	36%	43%	51%	57%	64%	72%	79%	85%	93%	100%

**C. Keterangan**

	Hambatan / Permasalahan *)	Rencana Pemecahan Hambatan / Permasalahan	Realisasi Pemecahan Hambatan / Permasalahan
1			
2			
3			

Keterangan : Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

\*) Hambatan / Permasalahan diisi apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan

Stamp: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN, BADAAN RISET DAN SDM KP, POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN JAKARTA  
 Signature: Muhammad Hery Riyadi Alauddin

**PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO**

SATUAN KERJA : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta  
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Pengadaan Bahan Makan Taruna (Catering) TA.2022

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Spesifikasi dan kuantitas makanan/ catering yang disajikan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak	PPA/PPK/ Pj.Kegiatan/SPI/ Pembina Taruna	5.0	3.7	18.5	Melakukan pemantauan dan pengawasan secara efektif oleh PPK/SPI/Pembina Taruna dan Pj.Kegiatan secara rutin dan berkesinambungan	Mulai TW-II s/d TW.IV	Kuantitas makanan siap saji (catering) memberikan dampak positif, sehingga pemenuhan gizi dan kuantitas makanan dapat terpenuhi dengan baik	TW-IV	2	1	2	Koordinasi pelaksana lapangan dari penyedia (Kontraktor) dan pengawasan dari pihak Politeknik AUP tidak efektif, sehingga informasi yang disampaikan tidak tepat sasaran.	Efektifitas pengawasan, koordinasi yang baik dan berkesinambungan serta anggaran bahan makan perlu ditingkatkan untuk tahun berikutnya.

**Keterangan :**

- Kolom 2 s.d. 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko
- Kolom 9 dan 10 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
- Kolom 11 s.d.13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian termasuk kemungkinan dan dampak
- Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak efektifnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
- Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian



## PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta  
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Pengadaan Docking Kapal KM.Madidihang-03

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tertambatnya pelaksanaan pekerjaan kegiatan docking	Nakhoda/PPK/Pj.Kegiatan/SPI	4.8	4.0	19.2	Melakukan koordinasi dan pemantauan dari lingkup internal Politeknik AUP serta pihak Penyedia/ Kontraktor secara berkala dan rutin (setiap minggu)	Mulai TW-II s/d TW-IV	Pekerjaan Docking dapat dilaksanakan selesai tepat waktunya sesuai dengan kontrak, sehingga kapal KM.Madidihang-03 dapat dimanfaatkan untuk praktik bagi taruna.	TW-IV	2	1	2	Dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan docking sering kali ada perubahan item pekerjaan, sehingga harus dilakukan addendum kontrak.	Pj.Kegiatan dan Nakhoda harus melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif dengan kontraktor perencana, agar pelaksanaan pekerjaan docking berjalan sesuai kontrak.

**Keterangan :**

1. Kolom 2 s.d. 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko
2. Kolom 9 dan 10 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
3. Kolom 11 s.d.13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian termasuk kemungkinan dan dampak
4. Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak efektifnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
5. Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian



**PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO**

SATUAN KERJA : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta  
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Budidaya Udang Vaname Siklus-1, 2 dan 4

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Target program PNBP tidak tercapai, karena pada tahap siklus-1 budidaya udang di tambak busmetik terdampak banjir ROB	Pj.Kegiatan/PPK/SPI/Pengelola Tambak	4.7	4.3	20.21	Melakukan koordinasi secara efektif antara Pj.Kegiatan dan PPK dalam rangka percepatan pelaksanaan praktik budidaya udang vaname untuk tahapan siklus selanjutnya	Mulai TW-I s/d TW.IV	Terlaksananya kegiatan praktik secara berkelanjutan sesuai waktu yang sudah ditentukan dalam kalender akademik	TW-IV	2	1	2	Tambah terdampak banjir ROB, sehingga udangnya mati dan tidak adanya anggaran penambahan siklus untuk praktik budidaya udang vaname	Perlu adanya penambahan anggaran siklus praktik dan target PNBP tidak terlalu melampaui risiko yang terlalu tinggi

DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN  
 MUHAMMAD FERY RIYADI ATADDIN

**Keterangan :**

1. Kolom 2 s.d. 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko
2. Kolom 9 dan 10 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
3. Kolom 11 s.d.13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian termasuk kemungkinan dan dampak
4. Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak efektifnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
5. Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian

## PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta  
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama (55% dari Penerimaan)

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Barang yang dikirim oleh Penyedia tidak sesuai jadwal	PPA/PPK/Pj.Kegiatan/SPI/Pembina Taruna	5.0	3.8	19	Pemantauan dan pengawasan langsung oleh PPK/Pj.Kegiatan secara rutin dan berkesinambungan, sehingga barang yang dikirimkan oleh Penyedia/Kontraktor dilakukan secara bertahap	Mulai TW-II s/d TW.IV	Pelaksanaan pengadaan perlengkapan untuk taruna Pumahan berjalan dengan baik dan sesuai jadwal yang sudah dtentukan dalam kontrak	TW-IV	2	1	2	Barang dikerjakan dalam jumlahnya yang cukup banyak, tetapi tidak menjadikan hambatan yang berarti oleh penyedia/kontraktor	Keseragaman taruna perlu diperhatikan dan lelang harus dilakukan lebih awal, sehingga barang yang dikirimkan tidak boleh bertahap dan harus tepat waktu

**Keterangan :**

- Kolom 2 s.d. 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko
- Kolom 9 dan 10 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
- Kolom 11 s.d.13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian termasuk kemungkinan dan dampak
- Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak efektifnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
- Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian







## PENGENDALIAN RUTIN

### Satuan Kerja: POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN JAKARTA

No.	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan	Data Dukung
A.	Organisasi		
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Tujuan organisasi sudah tertuang dalam Permen KP No.6 Tahun 2017, dan Renstra BRSDMKPTahun2015- 2019	Dokumen renstra, LKJ
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Semua pejabat struktural lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta sudah mengetahui tujuan organisasi karena sudah membaca Renstra dan membuat serta mengisi e-SKP. Untuk pegawai sudah mengetahui tujuan organisasi yang secara umum adalah mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan	SKP
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	Satuan kerja sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan.	SOP
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP yang ada secara umum sudah berjalan dan ditaati.	SOP
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	SOP disusun berdasarkan alur kegiatan dan penanggung jawab kegiatan, serta waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan, akan tetapi belum berbasis risiko	SOP
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Sudah terdapat pemisahan tugas dan fungsi,	Uraian tugas Ka. Satker Sampai staf
B.	Perencanaan		
1.	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Penyusunan perencanaan/rencanakerja dan anggaran (RKA) pada seluruh kegiatan sudah melibatkan pihak yang berkompeten seperti Inspektorat, Biro Perencanaan dan DJA	CHR Itjen, CHP Roren
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/aset sudah disusun dengan berdasarkan pada kebutuhan dan pengusulan dari satker terkait	TOR dan RAB
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan barang/aset secara umum sudah mempertimbangkan risiko pemanfaatan, akan tetapi pada beberapa satker masih ditemukan aset yang tidak dimanfaatkan (kekurangan daya listrik, tidak tersedia manual book, terbatasnya alokasi anggaran untuk pemanfaatan)	TOR dan RAB
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	TOR dan RAB
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang	Sudah disusun MR kegiatan prioritas BRSDMKP, akan tetapi kegiatan pengendalian belum terdokumentasikan dengan baik	MR

	seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko		
6.	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Pada Tahun 2017, telah dilakukan efisiensi organisasi sehingga diperlukan penyesuaian DIPA dari target sebelumnya yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.	RICT, RKAKL. TOR, RAB
7.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Tidak terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Chr RKAKL Itjen
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Tidak terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) karena sudah dilakukan revisi	CHR UC, CHR RKAKL
C.	<b>Pelaksanaan Anggaran</b>		
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Pertanggungjawaban secara umum sudah disertai bukti yang lengkap, valid dan sesuai ketentuan.	LPI Bendahara
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Tidak terdapat pekerjaan yang dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Dokumen Kontrak
3.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Proses PBJ sudah dilaksanakan sesuai ketentuan melalui LPSE	LHA Itjen/BPK
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	Tidak terdapat kegiatan pemecahan kontrak untuk menghindari lelang	Kontrak
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	Tidak ada mark up harga	LHA dan LHP Itjen BPK
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Tidak ada penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	LHA dan LHP Itjen BPK
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Tidak terdapat bayar ganda rnaupun melebihi standar yang ditetapkan	LHA dan LHP Itjen BPK
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Tidak terdapat sisa kas akhir tahun tertambat disetorkan. Apabila terlambat disetor segera ke kas negara dan melakukan rekonsiliasi serta mencatat dalam Laporan Keuangan.	SSBP
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Kepemilikan aset sudah disertai bukti yang sah	Sertifikat. PSP, SK Pj BMN
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Pengalihan/revisi anggaran sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	RKAKL
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Dilakukan ralat/revisi SP20 untuk menyesuaikan pembebanan pagu anggaran	IRA
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Tidak terdapat pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBN	LHA Itjen/BPK, BAP Kas, Calk di LK, SK Pengelola anggaran
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	Terdapat pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	SK Pejabat pengelola anggaran

14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran memadai	Uraian tugas pejabat pengelola anggaran
15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Tidak terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan	Laporan hasil audit (Itjen/BPK)
D.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Pemotongan uang jaminan pelaksanaan sebesar denda dimaksud	SSBP, SAP hasil pekerjaan, IHA Itjen, LHA BPK
2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Tidak terdapat penggunaan langsung penerimaan negara.	Laporan Simponi dan laporan penggunaan dana PNBP
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Tidak terdapat penerimaan yang diterima/digunakan instansi yang tidak berhak	
4.	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Harga pasar lebih tinggi dari tarif PNBP sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	LHA itjen, LHA BPK
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara telah sesuai ketentuan	LHA itjen, LHA BPK
E.	Akuntansi dan Pelaporan		
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Dilakukan perbaikan pencatatan dan melakukan upload nilai pencatatan yang telah benar melalui e-rekonsiliasi	BAR internal dan eksternal, CHR Itjen
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang, sehingga proses yang dijalankansudah sesuai ketentuan.	LK PMK 177 tahun 2015
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Tidak terjadi keterlambatan penyampaian laporan	BAR e-rekon
4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Laporan telah mengacu kaidah yang berlaku	LK PMK 177 tahun 2015, CHRLK
5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	SOM yang bersangkutan dapat berkoordinasi/konsultasi dengan KPPN atau instansi yang berwenang. SDM dapat mengikuti pelatihan bimtek penyusunan laporan	SK operator SAI
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan	Aplikasi slmak BMN
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN dan persediaan sudah dilakukan secara memadai	Laporan barang persediaan (aplikasi persediaan)
F.	Kerugian Negara		
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	Tidak terdapat belanja/ pengadaan barang/jasa fiktif	LHP

2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Tidak ada rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan.	LHA dan LHP Itjen BPK
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak terdapat kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.	LHA dan LHP Itjen BPK
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak terjadi kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	LHA dan LHP Itjen BPK
5	Pemahalan harga ( <i>Mark up</i> )	Tidak ada mark up harga	LHA dan LHP Itjen BPK
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	Tidak ada penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	LHA dan LHP Itjen BPK
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	Tidak terdapat bayar ganda maupun melebihi standar yang ditetapkan	LHA dan LHP Itjen BPK
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Spesifikasi barang/jasa yang diterima telah sesuai dengan kontrak	LHA dan LHP Itjen BPK
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Tidak terdapat belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan, apabila terdapat dikembalikan ke kas negara sebesar kelebihan tersebut	LHA dan LHP Itjen BPK
10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	Penjualan/pertukaran/penghapusan negara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan negara	LHA dan LHP Itjen BPK
11	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	Tidak terdapat penyetoran penerimaan negara fiktif	LHA dan LHP Itjen BPK
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Tidak terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan. Jaminan pekerjaan tetap berlaku.	LHA dan LHP Itjen BPK
13	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Rekanan telah melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	LHA dan LHP Itjen BPK
14	Aset dikuasai pihak lain	Tidak ada aset yang dikuasai oleh pihak lain	LHA dan LHP Itjen BPK
15	Pembelian aset yang berstatus sengketa	Tidak ada pembelian aset yang masih berstatus sengketa	LHA dan LHP Itjen BPK
16	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	Tidak terdapat pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	LHA dan LHP Itjen BPK
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	Jaminan pekerjaan akan dicairkan apabila seluruh pekerjaan telah selesai. Apabila melewati waktu kontrak ada	LHA dan LHP Itjen BPK
G. Kepegawaian			
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Masih ada pegawai yang terlambat masuk kerja	Data presensi/hasil finger print
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Seluruh pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensinya	SKP
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Instansi sudah mempunyai rencana pengembangan pegawai	Usulan pengembangan SDM di bag. Kepegawaian
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan, dan	SK Penjatuhan Hukuman Disiplin

		sudah ditindak lanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin	
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	Seluruh Pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya	SKP
H.	Kinerja		
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Seluruh kegiatan telah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Rentra, LKJ
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan	ROK, Laporan form Smart DJA dan e-Monev Bappenas
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Telah dilakukan reuiu POK sesuai dengan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan.	ROK, Laporan form Smart DJA dan e-Monev Bappenas
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Terdapat kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang diakibatkan adanya efisiensi anggaran/self blocking.	LKJ, ROK, Laporan form Smart DJA dan e-Monev Bappenas
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Tidak terdapat kegiatan yang dalam pelaksanaannya menyimpang dari tujuan organisasi	LKJ



Direktur Poltek AUP,

Muhammad Hery Riyadi Alauddin

